



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.041.096.136.039 (*Satu Triliun Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 41.453.316.000 (*Empat Puluh Satu Miliar Empat*

Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 8.000.000.000 (*Delapan Miliar Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 3.168.750.000 (*Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) .
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 2.900.000.000 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 27.384.566.000 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 964.964.420.039 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 945.460.970.539 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*);

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 19.503.449.500 (*Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*);.

Pasal 6

- (1) Anggaran Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp. 34.678.400.000 (*Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan sebesar Rp. 34.678.400.000 (*Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.057.575.821.585 (*Satu Triliun Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp. 674.453.320.008 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 398.003.260.022 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 266.015.249.113 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Miliar Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 0 (Nol).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 0 (Nol).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 7.201.060.873 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Satu Juta Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 3.233.750.000 (*Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp. 208.103.942.374 (*Dua Ratus Delapan Miliar Seratus Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

- e. Belanja Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.058.000.000 (*Satu Miliar Lima Ratus Delapan Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 26.161.537.190 (*Dua Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 86.785.742.572 (*Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 93.598.662.612 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp. 8.200.000.000 (*Delapan Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp. 166.818.559.203 (*Seratus Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 166.818.559.203 (*Seratus Enam Puluh Enam*

Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 16.479.685.546 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp. 19.329.685.546 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 19.329.685.546 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp. 2.850.000.000 (*Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.850.000.000 (*Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 16.479.685.546 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 16.479.685.546 (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*),

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- | | |
|-----------------|--|
| 3. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5. Lampiran V | Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |

Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Piru, 16 Januari 2021

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MUHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di P i r u
Pada tanggal 18 Januari 2021



MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021
NOMOR 0218

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 23 ayat 1 menyebutkan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada hasil evaluasi RKPD tahun 2020 yang telah dirumuskan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Perubahan Kebijakan dan Perubahan asumsi makro ekonomi daerah turut dikoreksi dalam proses APBD Tahun Anggaran 2021 sering dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional dan daerah pada Tahun 2020. Disamping itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 19.329.685.546,- merupakan estimasi guna pembiayaan daerah yang dimanfaatkan penggunaanya dalam mengendalikan defisit APBD Tahun Anggaran 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.453.316.000
4.1.01	Pajak Daerah	8.000.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	327.500.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	130.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	130.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	35.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	35.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	97.500.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	97.500.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	65.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	65.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	480.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	350.000.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	35.000.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	35.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	40.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	40.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	30.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	30.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	60.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	60.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	330.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	175.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	175.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	75.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	75.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	80.000.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	80.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.200.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.200.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.200.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	500.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	500.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	500.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.162.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.162.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.162.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	380.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	380.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	380.000.000

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	60.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	60.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.168.750.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.833.750.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.225.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	200.000.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	900.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	125.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	225.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	75.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	75.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	75.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	130.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	130.000.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000
4.1.02.01.07.0002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	50.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	203.750.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	203.750.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	860.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	290.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	290.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	330.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	75.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	255.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	75.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	75.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	90.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	90.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	475.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	175.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	175.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	120.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	120.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	180.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	180.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.900.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.900.000.000

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.900.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	27.384.566.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	150.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	150.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.630.799.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.530.799.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.530.799.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.000.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.775.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.775.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.775.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	150.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	75.000.000
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.000.000
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	75.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	85.000.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	85.000.000
4.1.04.13.01.0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	85.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	350.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	350.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	350.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	18.993.767.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.993.767.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.993.767.000
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	964.964.420.039
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	945.460.970.539
4.2.01.01	Dana Perimbangan	837.494.797.539
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.538.807.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.608.681.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	1.904.344.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	550.023.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	243.851.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.103.589.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	578.985.055.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	578.985.055.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	162.546.156.539
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.018.327.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	26.437.342.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	15.175.386.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	15.843.617.064
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	6.822.500.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.986.214.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	660.900.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.446.812.026
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	18.851.836.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.123.281.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.518.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	43.382.607.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	13.170.920.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	4.219.583.662
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.286.867.950
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.601.962.837
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	86.424.779.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	41.284.859.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	918.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.880.717.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.398.800.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	483.900.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.642.536.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	718.740.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.033.919.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.717.039.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.874.149.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	393.383.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.978.737.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	100.000.000
4.2.01.05	Dana Desa	107.966.173.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	107.966.173.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	107.966.173.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.503.449.500
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	19.503.449.500
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.503.449.500
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.143.121.059
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.779.774.627
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.278.960.107
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.293.593.707

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.678.400.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	34.678.400.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	34.678.400.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	34.678.400.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	34.678.400.000
	Jumlah Pendapatan	1.041.096.136.039
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	674.453.320.008
5.1.01	Belanja Pegawai	398.003.260.022
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	317.891.041.422
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	239.948.516.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	239.948.516.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.747.906.924
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.747.906.924
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.209.293.800
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.209.293.800
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.456.989.200
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.456.989.200
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.762.708.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.762.708.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.521.767.680
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.376.610.080
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	145.157.600
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	172.089.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	167.243.000
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.846.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	76.162.200
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	76.162.200
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.505.116.818
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.505.116.818
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	633.493.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	629.377.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	4.116.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.744.998.800
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.744.998.800
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	112.000.000
5.1.01.01.13.0001	Belanja Jaminan Hari Tua PNS	112.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.202.929.200
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	38.400.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	14.400.000
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	24.000.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	41.284.859.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	41.284.859.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.880.717.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	6.880.717.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	918.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	918.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.048.212.200
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.048.212.200
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.883.941.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.877.798.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.948.143.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	58.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	148.800.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	7.200.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	141.600.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.111.603.600
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	590.216.400
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	590.216.400
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.630.800
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.630.800
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	106.892.400
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	106.892.400
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	59.022.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	59.022.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	855.813.600
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	855.813.600
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.194.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.194.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.874.500.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.874.500.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.162.350.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.162.350.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	89.588.400
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	89.588.400
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.911.296.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	162.480.800
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.722.400
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1.742.800
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.745.350.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.282.100.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.282.100.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	181.085.800
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.238.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.238.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.873.600
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.873.600

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.228.400
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.228.400
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.355.200
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.355.200
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	233.800
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	233.800
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.613.600
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.613.600
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	406.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	406.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	135.800
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	135.800
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	616.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	316.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	316.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.015.249.113
5.1.02.01	Belanja Barang	94.623.745.212
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	94.541.245.212
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	469.717.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.700.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.315.010.400
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	395.643.200
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	390.250.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	43.656.980.632
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	879.574.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	396.390.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.720.264.590
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.328.020.360
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	384.382.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	99.644.400
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.199.611.100
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	38.070.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	106.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	46.197.500
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.142.246.495
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.026.913.485
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.059.579.950
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	41.652.900
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	10.800.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.164.262.100
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.784.980.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.576.565.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	125.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.442.555.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	76.500.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	43.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	55.539.100
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	125.400.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	8.160.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	30.000.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	2.886.000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	26.250.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	27.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	85.500.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	219.000.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	24.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	82.500.000
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	82.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	75.862.516.747
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	42.168.493.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	36.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.364.710.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.112.970.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	172.750.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	14.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	289.040.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.150.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	558.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.772.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.459.017.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	445.700.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.214.500.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	58.200.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	162.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	36.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.728.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	559.920.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.744.700.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.730.940.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.497.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	792.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	9.750.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	80.200.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	181.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	42.075.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	84.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	17.295.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	10.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	108.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	22.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	113.750.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.895.300.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	143.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	668.860.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	21.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	584.300.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	350.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	82.666.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.497.526.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	5.000.000.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.516.300.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	681.226.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	80.070.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	219.929.600
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	470.169.600
5.1.02.02.03.0016	Belanja Sewa Tanah Non Persil Lainnya	470.169.600
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.113.139.800
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	180.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.132.350.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	78.180.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	42.000.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	30.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	101.000.000
5.1.02.02.04.0050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	73.500.000
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	20.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	864.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	583.910.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.610.000
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	918.989.800
5.1.02.02.04.0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	15.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	72.600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.254.250.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	170.000.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	43.200.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.255.300.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	149.500.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	160.000.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	476.250.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	527.800.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	498.500.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	29.300.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.822.338.347
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.022.195.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	73.440.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	956.800.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	70.407.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.900.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	185.900.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	454.014.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	104.702.347
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	44.880.000
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	10.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.280.900.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	226.650.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.805.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.007.750.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	241.500.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	5.727.900.000
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	5.727.900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.855.132.054
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.232.462.750
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.048.040.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	344.852.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	958.870.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	53.000.000
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	100.000.000
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	20.240.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	46.880.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	366.850.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	173.410.750
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	95.320.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	25.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.415.185.204
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.120.940.600
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	204.900.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.989.344.604
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.207.484.100
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	14.167.070.000
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	40.414.100
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	73.335.855.100
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.335.855.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.120.015.100
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.215.840.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	338.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	338.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	338.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	7.201.060.873
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.082.960.873
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.582.960.873
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.582.960.873
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.118.100.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.118.100.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.118.100.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.233.750.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	570.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	570.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	570.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.663.750.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.663.750.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.663.750.000
5.2	BELANJA MODAL	208.103.942.374
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.058.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.058.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.058.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.058.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.161.537.190
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	38.864.900
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	37.364.900
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	37.364.900
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.500.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.500.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.878.584.500
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.522.184.500
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	765.856.600
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	136.114.200
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.620.213.700
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.356.400.000
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.356.400.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.960.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	6.000.000
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	6.000.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	13.960.000
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	13.960.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	3.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	3.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	17.706.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	17.706.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.640.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	9.066.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.355.968.040
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	78.461.440
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.552.600
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	73.908.840
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	539.185.100
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	386.264.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	152.921.100
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	738.321.500
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	157.192.900
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	363.962.300
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	25.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	192.166.300
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	61.750.900
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	61.750.900
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	31.824.800

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	29.926.100
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.477.550.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	602.500.000
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	602.500.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.875.050.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.875.050.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	8.804.541.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	467.815.400
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	178.640.000
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	238.200.000
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	50.975.400
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	55.675.600
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	17.219.600
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	38.456.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	8.281.050.000
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	8.281.050.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.032.001.350
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.607.984.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.421.984.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	186.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.424.017.350
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	180.550.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.243.467.350
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	20.270.500
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	20.270.500
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	20.270.500
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	65.000.000
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	65.000.000
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	65.000.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	193.340.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	193.340.000
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	193.340.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	1.193.000.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.193.000.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	5.000.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	60.000.000
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	1.128.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.785.742.572
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	85.906.856.672
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	81.827.249.066
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.000.000.000
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	496.310.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	2.841.692.000
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	17.909.244.200
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	790.125.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Seram Bagian Barat
Nomor : 1 TAHUN 2021
Tanggal : 16 Januari 2021

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	56.198.342.496
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	174.000.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	181.535.370
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	236.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.079.607.606
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	4.079.607.606
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	878.885.900
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	878.885.900
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	878.885.900
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.598.662.612
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	73.596.799.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	71.700.619.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	69.849.949.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.850.670.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.896.180.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.896.180.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	16.494.714.612
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.567.363.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.567.363.000
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	873.500.000
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	873.500.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.855.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.855.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	7.083.457.062
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	37.073.400
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	7.046.383.662
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.115.394.550
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	42.870.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	4.072.524.550
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.923.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	323.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	323.000.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.600.000.000
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	2.600.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	584.149.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	584.149.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	584.149.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	50.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	50.000.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	50.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	450.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	450.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	450.000.000

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.200.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	8.200.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	166.818.559.203
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.818.559.203
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	166.818.559.203
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	166.818.559.203
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	166.818.559.203
	Jumlah Belanja	1.057.575.821.585
	Total Surplus/(Defisit)	(16.479.685.546)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.329.685.546
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.329.685.546
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	19.329.685.546
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	19.329.685.546
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	19.329.685.546
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	19.329.685.546
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.850.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.850.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.850.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.850.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.850.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.850.000.000
	Pembiayaan Netto	16.479.685.546



Bupati Seram Bagian Barat

MUHAMMAD YASIN PAYAPO